

Proceeding

Seminar Internasional

Forum FIP- JIP se Indonesia

MEDAN, 29 - 31 Oktober 2013

BUKU 3
MAKALAH
Sumbangan
Jurusank:
BK, PLS, PGSD, dan PLB

T e m a:

**PENGUATAN ILMU PENDIDIKAN UNTUK
MENGHASILKAN LULUSAN TERDIDIK DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013**



**Proceeding Makalah Sumbangan Seminar Internasional
Forum FIP-JIP se-Indonesia, 29 - 31 Oktober 2013
Penguatan Ilmu Pendidikan untuk Menghasilkan Lulusan Terdidik dalam
Implementasi Kurikulum 2013**

ISBN : 978-602-7938-64-9

Editor : Prof. Dr Yusnadi, MS.
Drs. Wildansyah Lubis, M.Pd.

Reviewer : Prof. Dr. Siman Nurhsdi, M.Pd.
Dr. Anita Yus, M.Pd.
Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd.
Drs. Eduard Purba, MA
Dra. Rahmulyani, M.Pd.
Drs. Rahim Sitompul, MS
Nani Barorah, S.Psi, MA

Tata letak : Elfi Farida, S.Pd.

Desain Sampul : Panitia Forum FIP-JIP

Cetakan Pertama : Oktober 2013

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau upaya hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

| | | |
|-------|--|----------------|
| 4.5.6 | MENGGAGAS PARADIGMA BARU PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH UNTUK MASA DEPAN Sudirman | 310 |
| 4.6. | JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 329-599 |
| 4.6.1 | PEMBELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BRUNER DI SEKOLAH DASAR Elma Alwi | 325 |
| 4.6.2 | PENGUNAAN PERTANYAAN PENUNTUN UNTUK MENING- KATKAN KEMAMPUAN MEMBACA LITERAL DI KELAS III SEKOLAH DASAR Wasnilimzar | 337 |
| 4.6.3 | PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SISTEM PEMBELAJARAN TEMATIK DENGAN MEMANFAATKAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH ALAM MINANGKABAU Eldarni | 349 |
| 4.6.4 | PENGUATAN OTONOMI GURU SEKOLAH DASAR DI TENGAH KEBIJAKAN POLITIS PENGUSA DAERAH Arif Rohman | 376 |
| 4.6.5 | PENGUNAAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES UNTUK PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR Fatmawati | 394 |
| 4.6.6 | THE EFFECT OF INSTRUCTIONAL STRATEGY PROBLEM BASED LEARNING ON STUDENTS' ACHIEVEMENT IN EVALUATION LEARNING OBJECTIVES PGSD FIP UNIMED Edward Purba | 407 |
| 4.6.7 | MEMBERDAYAKAN POTENSI KECERDASAN MAJEMUK MAHASISWA PGSD UNP DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA Masniladevi, dan Yullys Helsa | 429 |
| 4.6.8 | PENDEKATAN PMR DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Melva Zainil | 440 |
| 4.6.9 | 2013 CURRICULUM IMPLEMENTATION OF SCIENCE EDUCATION IN THE STRENGTHENING OF EDUCATIONAL LEARNING Betty Eva Simanjuntak | 451 |

PENGUATAN OTONOMI GURU SEKOLAH DASAR DI TENGAH KEBIJAKAN POLITIS PENGUASA DAERAH

Oleh:
Arif Rohman
(PGSD/KP FIP-UNY)

Abstract: Teacher is respectable person in the human community . His respectability is due to speech, action, and science teacher who is seen by many as the image model which makes it have a very important position and role in the process of transformation in society. However , with a very important position and role are then exploited by interest groups in a political power relations in the region. Indonesia's regional autonomy in place since the issuance of Law No. 22 year 1999 on Regional Government the latter converted into Law No. 12 year 2008, has changed the landscape of political power relations in the region , from centralized to decentralized nature . In the field of education , regional autonomy in general has resulted in the overhaul of the management structure of power relations in the area of education. Regents and mayors to be the most competent to regulate and control the number of civil servants, including the elementary school teachers. This opens up opportunities for him to bargain even do pemaksaman against teachers. Moreover, elementary school teachers who incidentally was the simplest politicized as the weakest in the resistance. The politicization of teachers make seriously affect, including the stunted role and duties of teachers, critical deficiencies in the teacher education problems, creativity bluntness of teachers, and teacher professional development delays. To avoid this is by strengthening the autonomy of teachers . Strengthening autonomy refers to two things: the independency and sovereignty, so that teachers become more self-sufficient and no external force or impose its will push towards strengthening the professionalism of teachers. Teacher professionalism rests on moral principles, namely: idealism, expertise, commitment, dedication, development of the resources, competence, and continuity. Furthermore, efforts to develop teacher competence can be developed that are rooted in the four pillars of the political ideology of nationalism.

Keywords: Politicization of teachers, strengthening the autonomy, and the teacher competence rooted in the four pillars of national ideology politics.

A. Pendahuluan

Guru merupakan sosok manusia yang dapat ‘digugu’ (ditaati) dan ‘ditiru’ (diikuti). Sosok yang ditaati karena ucapannya memuat nasehat kebenaran (*truthfulness*) dan kejujuran (*fairness*), sedangkan sosok yang diikuti karena tingkah lakunya mengandung keteladanan akhlak (*moral*) dan karakter mulia (*good character*). Bukan sebaliknya, sosok guru bukanlah sosok ‘wagu’ (tak pantas) dan ‘sarū’ (jorok). Citra diri positif guru yang demikian merupakan label yang telah disematkan masyarakat kepada guru yang sudah berlangsung sejak lama sejak ratusan tahun silam. Karenanya, guru dianggap mayoritas masyarakat sebagai manusia dengan karakter terpuji, yang terpancar dalam bentuk kedalaman ilmu, kebenaran tutur kata, kesantunan perilaku, kesahajaan penampilan, keramahan bergaul, kesalehan beribadah, dan ketulusan pengabdian. Sosok guru dengan karakter terpuji tersebut pada gilirannya dapat berdampak positif bagi masyarakat sekelilingnya dalam rangka membangun kemajuan peradaban umat manusia.

Sebagai sosok dengan citra dan kepribadian positif tersebut, kedudukan dan peran guru menjadi sangat penting dalam proses transformasi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Joni (1991), yang menyebutkan guru memiliki kedudukan penting dalam mengembangkan sumberdaya manusia untuk kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Barnadib (1994) menyebutkan bahwa guru berperan membantu banyak orang dalam mengembangkan segenap potensinya demi mencapai kemajuan kemanusiaan. Dengan demikian menjadikannya mereka sebagai sumber referensi dan inspirasi utama masyarakat. Guru dianggap sebagai sosok yang rela ‘menceburkan diri’ dalam masyarakat dan terlibat dalam penyelesaian aneka problem kemasyarakatan. Guru seringkali terlibat dalam perjuangan pembebasan atas aneka persoalan yang melilit masyarakat melalui gerakan yang disebut ‘gerakan pembebasan’.

Namun, kedudukan dan peran guru yang amat penting tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Spring (1993) menemukan adanya relasi guru dengan kelompok kepentingan politik. Relasi guru dengan kelompok kepentingan politik tersebut dapat berlangsung saling menguntungkan (*symbiotic relation*) atau sebaliknya (*non-symbiotic relation*). Relasi guru dengan kekuasaan politik dapat bersifat *konfrontatif* atau sebaliknya bersifat *simbiotik* atau *kolaboratif*.

Beberapa kasus demonstrasi guru terhadap dominasi kekuasaan menunjukkan bukti adanya relasi konfrontatif guru, antara lain terlihat pada demonstrasi guru terhadap presiden Abdurrahman Wahid (Media Indonesia, 19 April 2000), demonstrasi guru terhadap presiden Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, 12 Mei 2010). Bahkan pada tahun 2002, demonstrasi guru di kabupaten Kampar, Riau berhasil melengserkan Bupati, begitu pula di kabupaten Lombok Timur yang berhasil

- Muhadjir, N. (2003). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: teori pendidikan pelaku sosial kreatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadjir, N. (2013). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pantoro, S. (2010). *Demonstrasi guru: Ada apa denganmu guru*. (**Error! Hyperlink reference not valid.**, Download tanggal 9 Agustus 2010)
- PB PGRI. (2008). *Kompendium*. Jakarta.
- Rohman. (2013a). *Guru dan kekuasaan: Dinamika relasi politik antara otonomi guru dan dominasi kekuasaan*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohman. (2013b). *Guru dalam pusaran kekuasaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Spring, J. (1993). *Conflict of Interests: the politics of American education*. New York: Longman
- Sumarno. (2013). *Pendidikan untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*. Pidato Dies Natalis ke-49 Tahun 2013 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supriyanto. (2010). *Dinamika politik pengambilan kebijakan pembentukan dua dinas pendidikan di kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. (1993). *Himpunan teori-teori politik*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga.